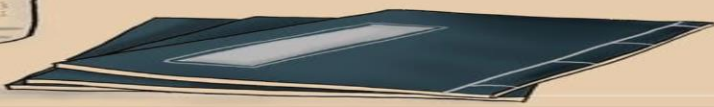




PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN BONTOCANI

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH LKj-IP
TAHUN 2022



PENGANTAR



CAMAT BONTOCANI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD Kecamatan Bontocani Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja (LKj) SKPD Kecamatan Bontocani Tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ketiga dalam masa RENSTRA Tahun 2019-2023 LKj Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

Penyusunan LKj SKPD Kecamatan Bontocani Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja SKPD Kecamatan Bontocani. Komitmen dalam penyusunan LKj SKPD Kecamatan Bontocani, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD Kecamatan Bontocani untuk

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas SKPD Kecamatan Bontocani Tahun 2022 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj SKPD Kecamatan Bontocani Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.



Bontocani, 23 Februari 2022

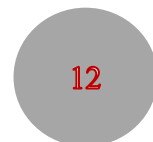
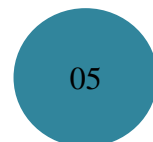
Camat Bontocani

MUHAMMAD ARSYAD, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP: 19660820 198803 1 002

DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

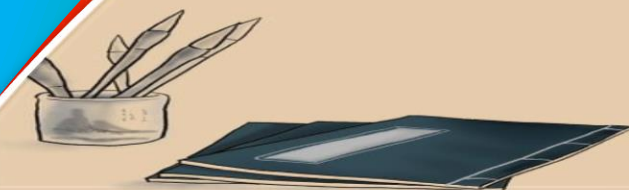
Kecamatan Bontocani merupakan kecamatan yang tidak hanya memberikan keindahan pegunungan saja akan tetapi Kita dapat menemukan berbagai keindahan lainnya seperti hutan pinus, jalanan yang berliku dikelilingi pemandangan gunung yang indah, wisata pinus yang menakjubkan serta destinasi wisata air terjun di beberapa desa, dan juga terdapat sebuah gua purbakala yang disebut gua uhallie.

A. UMUM

B. ORGANISASI

C. ISU STRATEGIS

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI



A. Umum

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan *Good governance*, di samping itu diperlukan suatu system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur. sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN).

Akuntabilitas Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi suatu organisasi secara terukur sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan kinerja pemerintah merupakan salah satu hal utama untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, Akuntabel, efektif dan efisien, disamping itu diperlukan suatu sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga dapat terlaksananya pemerintahan dan pembangunan yang berhasil, berdaya guna, bertanggung jawab dan bebas KKN.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat Pemerintahan Kota disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kinerjanya, dampak yang diharapkan adalah terwujudnya *clean government* dan *good governance* pada Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riwiew Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Bontocani.

Kecamatan Bontocani adalah salah satu kecamatan dari 27 Kecamatan di Kabupaten Bone yang terletak di sebelah Utara Kota Watampone. Luas wilayah Kecamatan Bontocani sekitar 463.35 Km² dengan Koordinat Geografis berada 05o9'-04o54' LS dan 119o54'-120o6' BT dengan Topografi berada pada lokasi daratan yang suhu sekitar 17-25⁰ celcius dengan jarak tempuh ±112 km dari ibu Kota Kabupaten. Kecamatan Bontocani berada pada ketinggian 600-700 m dari permukaan laut.

**Batas-Batas
Wilayah
Kecamatan
Bontocani**

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kecamatan Bontocani
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan

Luas Wilyah ±17.911 Ha

Jumlah
Penduduk
18.232
Jiwa

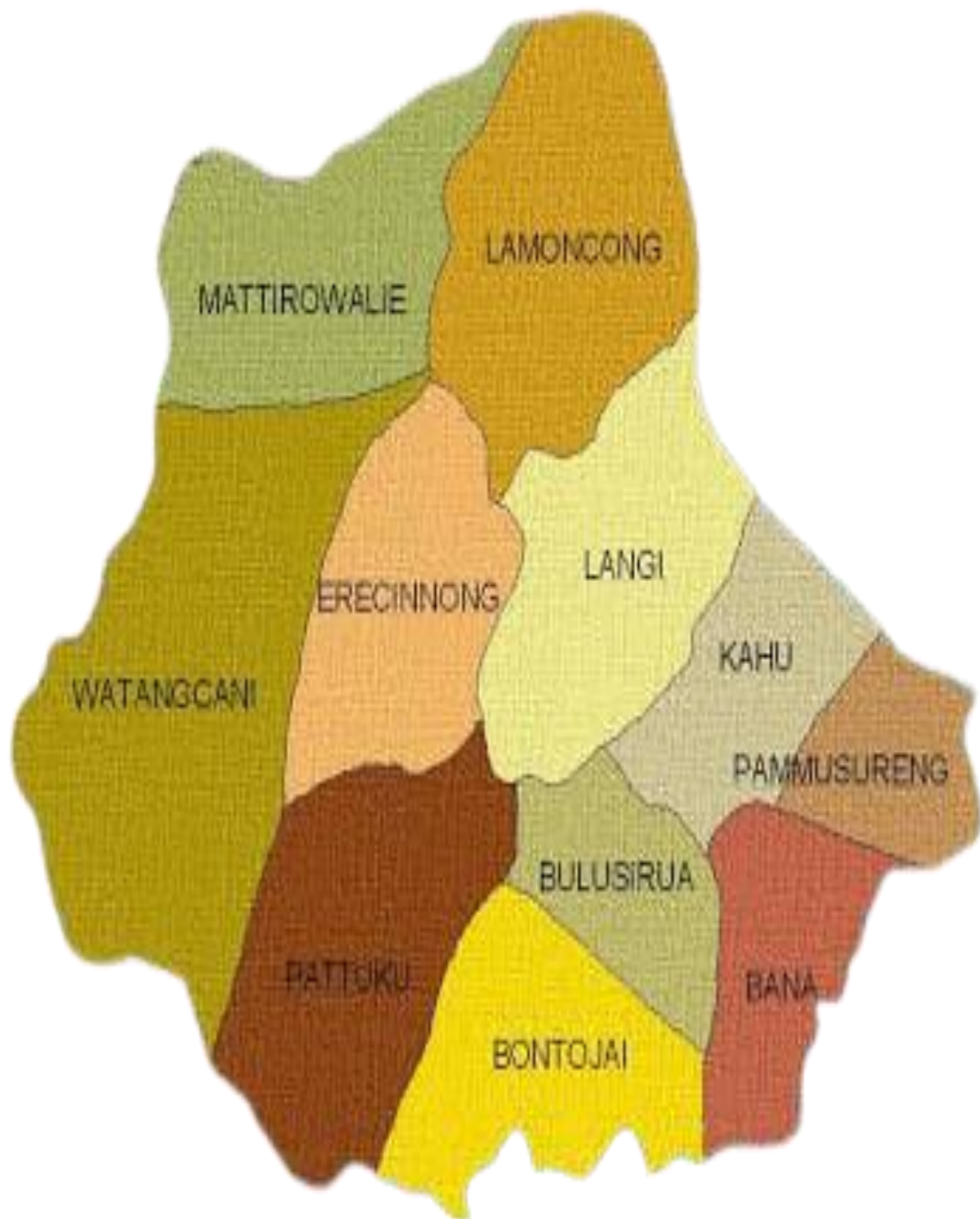
Curah Hujan 2.500– 3000 mm

Laki-Laki
(9.042 Jiwa)

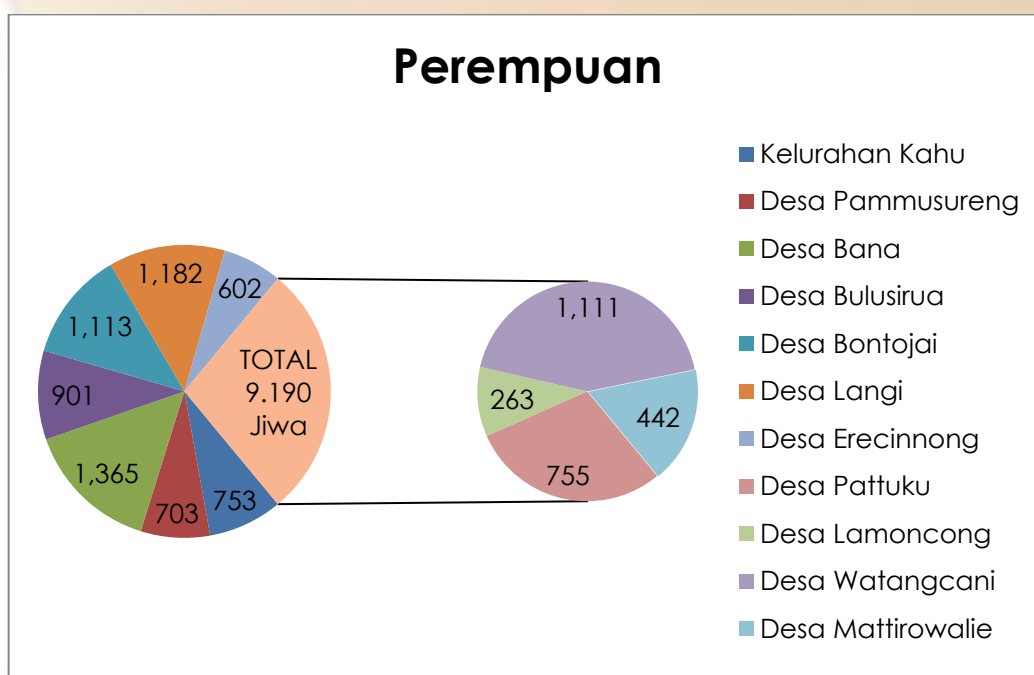
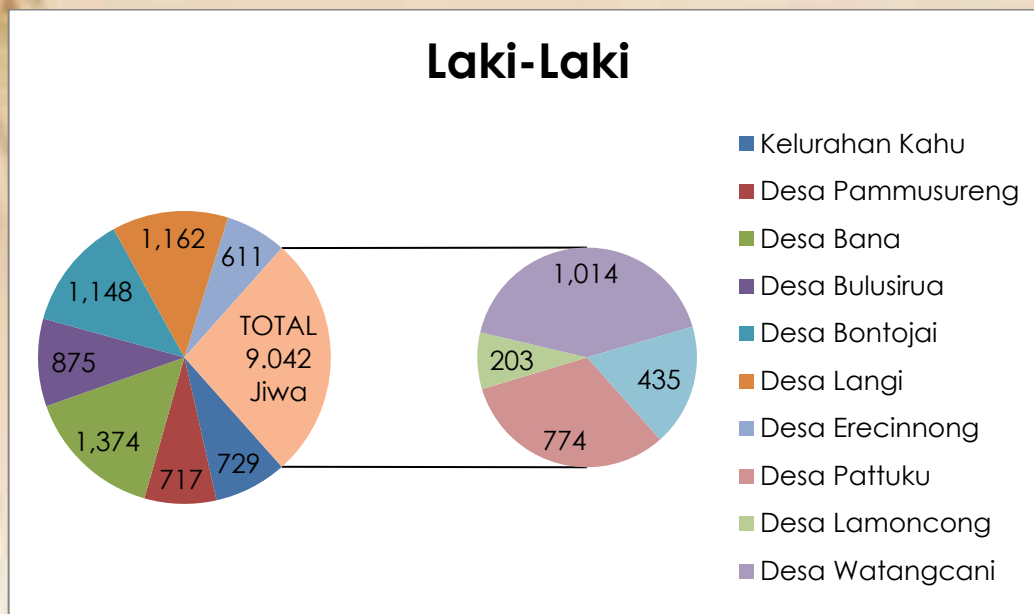
Perempuan
(9.190 Jiwa)



**PETA ADMINISTRATIF
KECAMATAN BONTOCANI
1 Kelurahan 10 Desa**



Secara demografi besar jumlah penduduk disetiap Desa/Kelurahan dapat dilihat pada diagram berikut :



Sumber Data : Kasi Pemerintahan dan Kependudukan Kecamatan

B. Organisasi

Sesuai dengan Susunan Organisasi Kantor Camat Bontocani Kabupaten Bone, berdasarkan Perbub Bone No. 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yaitu :

➤ Tugas

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah
2. Menyelenggarakan Tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan umum
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - f. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
 - h. Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

➤ Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas - tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8.

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi diantara lain sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan secara lengkap dapat diakses dengan memindai QR berikut:

CEK BARCODE



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BONTOCANI

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bontocani



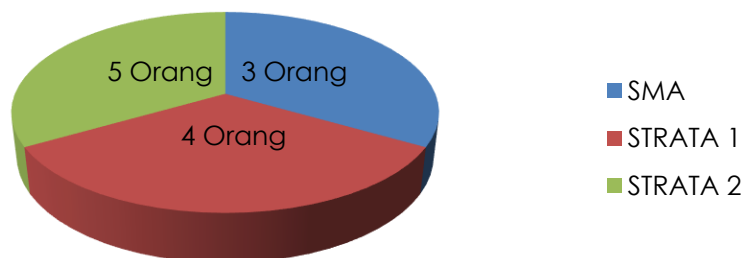
SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN BONTOCANI

Jumlah Pegawai Perempuan
Sebanyak 3 orang dari 12
Pegawai

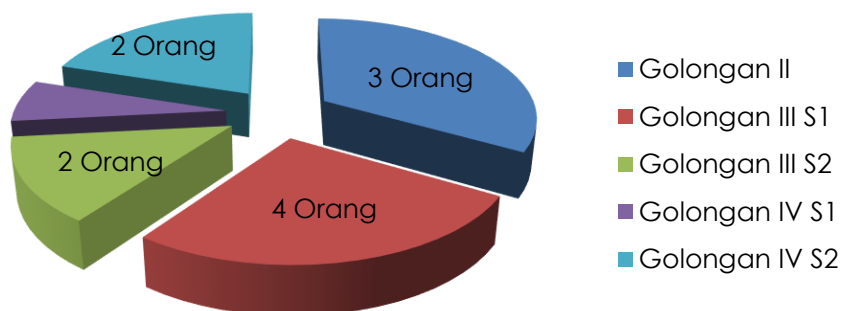


Jumlah Pegawai Pria
Sebanyak 9 orang dari
12 Pegawai

Jenis Pendidikan



Golongan



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Bontocani 2022

C. Isu Strategis

Isu Strategis, adalah merupakan suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya. Adapun isu strategis yang dihadapi Kecamatan Bontocani adalah sebagai berikut :

- ❖ Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Bontocani sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- ❖ Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- ❖ Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- ❖ Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- ❖ Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- ❖ Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.
- ❖ Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV- 2). Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan 19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian

berimbas pada perekonomian.

- ❖ Penanggulangan Pencegahan Stunting di wilayah Indonesia sudah berbagai program dan upaya yang dikeluarkan oleh unsur pemerintah bekerjasama dengan pihak kesehatan agar pencegahan Stunting di Indonesia berkurang demi upaya menciptakan anak bangsa yang sehat.

Selama kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Bontocani dituntut lebih responsif, kreatif dan inovasi dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan Pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembanguna daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintah menuju good governance and clean goverment sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan Isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi kecamatan Bontocani Pada tahun 2019 – 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Bontocani.

Secara Umum, Isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

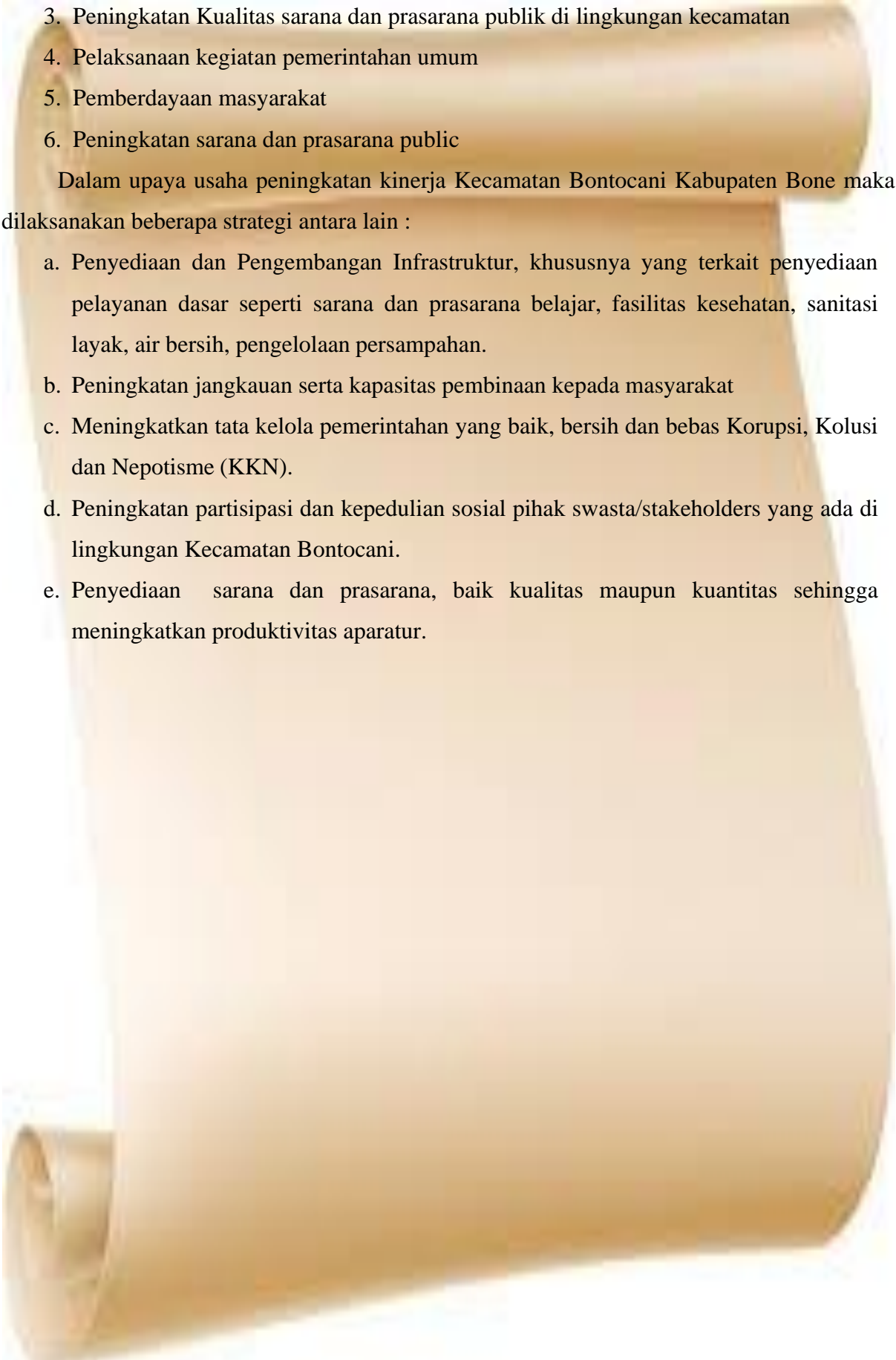
1. Tuntan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang maksimal;
2. Adanya tuntunan Akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan;
4. Masih tingginya volume pelayanan masyarakat yang harus ditangani/diselesaikan
5. Kondisi masyarakat yang aman, nyaman, tertib dan kondusif harus dijaga dan ditingkatkan

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penangan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam renstra Kecamatan mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan.

D. Aspek Strategis Organisasi

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun Aspek Strategi Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
2. Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan, capaian kinerja dan keuangan

- 
3. Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana publik di lingkungan kecamatan
 4. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum
 5. Pemberdayaan masyarakat
 6. Peningkatan sarana dan prasarana public

Dalam upaya usaha peningkatan kinerja Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone maka dilaksanakan beberapa strategi antara lain :

- a. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur, khususnya yang terkait penyediaan pelayanan dasar seperti sarana dan prasarana belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak, air bersih, pengelolaan persampahan.
- b. Peningkatan jangkauan serta kapasitas pembinaan kepada masyarakat
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- d. Peningkatan partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang ada di lingkungan Kecamatan Bontocani.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga meningkatkan produktivitas aparatur.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Di Kecamatan Bontocani terdapat destinasi wisata hutan pinus yang terletak di Desa Langi, Kelurahan kahu, dan Bulusirua dan masih banyak lagi destinasi wisata puncak seperti di Bahong Langi yang terletak di Desa Bontojai.



- A. TUJUAN DAN SASARAN
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- C. INDIKATOR KINERJA UTAMA
- D. PERJANJIAN KINERJA
- E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (Tiga) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bontocani, maka Kecamatan Bontocani dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Bontocani.

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan misi 1 ditetapkan sebagai berikut :

“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontocani”

2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bontocani Untuk mencapai tujuan diatas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yang merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan sasaran yang ingin dicapai tersebut adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik”

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
		Tujuan/Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontocani	Meningkatnya	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	B	BB	BB
	Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan (%)	96	97	98	99	100

Sumber Data: Renstra Perubahan Tahun 2018-2023

B. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Strategi Perangkat Daerah merupakan langkah-langkah prioritas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu menengah perangkat daerah.

Kecamatan Bontocani sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari dua factor.

Untuk pencapaian tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Salomekko, maka ditetapkan yaitu :

”Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen Kecamatan”.

2. Arah Kebijakan

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah. Strategi dan Arah Kebijakan dapat ditunjukkan melalui table berikut :

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Kecamatan Bontocani

VISI : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA

MISI : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas KKN

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontocani	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Melalui Perbaikan Manajemen Perangkat Daerah	Mengembangkan sistem operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum

Sumber Data : Renstra Perubahan Tahun 2018-2023

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bontocani digunakan untuk mengukur kinerja utama atau keberhasilan organisasi pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bontocani ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone

Pada bagian ini juga dikemukakan indikator Kinerja Utama Kecamatan Bontocani yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Bontocani

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontocani	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	-	-	B	BB	BB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan (%)	96	97	98	99	100

Sumber Data: Renstra Perubahan Tahun 2018-2023

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2018 -2023, dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2022 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana pada Tahun 2022 Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2022 menetapkan target-target kinerja sebagaimana target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) tersebut.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bontocani Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontocani	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	9.188.178.032
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan (%)	99	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	145.203.464
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	27.000.000
JUMLAH				9.360.381.496

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja secara lengkap dapat diakses dengan memindai QR berikut:

CEK BARCODE



E. Standar Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Bone. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kinerja Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

Tabel 2.5 Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Mata pencaharian terbesar masyarakat di Kecamatan Bontocani yaitu Madu, Gula Merah, Kemiri, Cabai Merah, Cabai Rawit, Kacang Tanah dan salah satu sumber kehidupan petani yaitu hasil dari persawahan seperti padi.



A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target / rencana masing-masing misi Kecamatan Bontocani dengan cara mencapainya melalui sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, program dan kegiatan serta disusun sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui tingkat prosentasi pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2022, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Bontocani meliputi :

Tujuan :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontocani, dengan indikator:

⇒ Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP

Sasaran :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator:

⇒ Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang Dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan %

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja tahun anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontocani	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	BB	BB	100%	Tercapai/Berhasil
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan (%)	99	99	100%	Tercapai/Berhasil
Rata-rata				100%	Tercapai/Berhasil

Sumber Data: Data Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Tabel di atas, rata-rata capaian antara tujuan dan sasaran strategis kecamatan yang didukung oleh 2 indikator kinerja utama didapatkan predikat dengan nilai 100% untuk indikator pertama *Tercapai/Berhasil*, sedangkan untuk sasaran indikator kedua telah *Tercapai/Berhasil*.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bontocani 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Bontocani apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2019-2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian		
			2019	2020	2021
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontocani	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	Presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Presentase pengaduan pelayanan Publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat kelurahan/Desa	100 %	100 %	100 %

Sumber Data: Renstra Perubahan Tahun 2019-2021

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontocani	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	B	B	B	B	BB		-	-	98%	100%	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	95	96	97	98	99		96	97	98	100	
Rata-Rata		95	96	97	98	99		96	97	98	100	

Sumber Data: Renstra Perubahan Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3.3 dan 3.2 diatas dapat dijelaskan bahwa hanya 1 indikator kinerja utama Kecamatan Bontocani yang dapat disandingkan peresentase capaian kinerjanya dengan Tahun sebelumnya yaitu indikator Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan. Indikator ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk indikator predikat Hasil SAKIP oleh APIP persentase capaian kinerjanya belum dapat disandingkan karena merupakan IKU Baru, tetapi realisasi kinerja pada indikator ini selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2020, 2021 dan 2022 sudah mengalami peningkatan (*stagnan*) dengan Predikat BB.

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan Bontocani Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontocani	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	BB	B	B	B	BB	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	99	96	97	98	99	

Sumber Data: Renstra Perubahan Tahun 2018-2023

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk Indikator kinerja utama yang pertama Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip belum mencapai jangka menengah, sedangkan untuk indikator kedua Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan telah mencapai target jangka menengah, sehingga target tahun berikutnya akan disesuaikan.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Bontocani dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.5 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal
/Standar Nasional Lainnya**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Standar Nasional	
				Target 2022	Realisasi 2022
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontocani	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	BB	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	99	-	-

Sumber Data: Renstra Perubahan Tahun 2022

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Bontocani tidak dapat disandingkan dengan standard nasional karena tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal/standar nasional lainnya.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6 Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110	90= \leq s/d<110	60= \leq s/d<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	100%	100%		√		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	100%	100%		√		
Rata-Rata			100%		√		

Sumber Data : Data Pengukuran Kinerja Tahun 2022 Kec. Bontocani

Berdasarkan data pada table 3.6, dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Bontocani tahun 2022 dalam kategori *Berhasil*.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontocani dengan indikator:

⇒ **Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP**

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi / unit kerja pemerintah.

Tabel 3.7 Pedoman Lima Komponen SAKIP

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30 %	a. Perencanaan Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25 %	a. Pemenuhan Pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15 %	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas Pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10 %	a. Pemenuhan Evaluasi (2%) b. Kualitas Evaluasi (5%) c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20 %	a. Kinerja yang Dilaporkan (Output) (5%) b. Kinerja yang Dilaporkan (Outcome) (10%) c. Kinerja Tahun Berjalan (Benchmark) (5%)
	Total	100 %	

Indikator ini diperoleh capaian kinerja 100 %, hal ini didukung oleh :

1. Perencanaan strategis telah dilakukan perubahan melalui perubahan Renstra 2022-2023 untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bontocani.
2. Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (per Triwulan).
3. Capaian Indikator kinerja Utama Kecamatan Bontocani Tahun 2022 diperoleh rata – rata dengan Nilai 100 (Berhasil)

4. Laporan Kinerja Kecamatan Bontocani menyajikan data yang informatif dan analisis yang memadai
5. Dilakukan evaluasi kinerja per Triwulan yang dipimpin oleh Camat Bontocani.

Meskipun capaian kinerja mencapai 100 % terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya yaitu belum terdapatnya cascading kinerja pelaksana. Upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Bontocani untuk meningkatkan predikat SAKIP oleh APIP pada Tahun 2022 melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Kabupaten Bone dan membuat Cascading Kinerja Jabatan Pelaksana.

Sasaran 1.1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:

⇒ Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan

Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan adalah jumlah pelayanan public yang dilayani/ditindak lanjuti sesuai standar dibagi jumlah pelayanan public yang masuk kali 100%.

Jenis pelayanan public pada kantor camat wilayah Kabupaten Bone :

- Penerima BLT
- Sosialisasi Protokol Kesehatan
- Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Desa dan Kelurahan

Indikator ini diporeleh capaian kinerja 110,33 % hal ini didukung oleh :

1. Telah tersusunnya Peta Proses Bisnis Kecamatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis
2. Terdapat SOP pada setiap jenis layanan
3. Adanya tunjangan Kinerja Pegawai yang menjadi motivasi kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
4. Telah dilakukan Bimtek Pelayanan Prima kepada beberapa ASN di Kecamatan.
5. Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh atasan langsung

Dalam pencapaian indikator ini meskipun 110,33 % diperoleh beberapa hambatan, antara lain :

1. Terjadinya pandemi Covid – 19 yang mengharuskan perubahan SOP dalam melayani masyarakat.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.

3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (Alat perekaman e-KTP)

Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

1. Melakukan digitalisasi pelayanan (Online)
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
3. Melakukan pemeliharaan alat perekaman e-KTP

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Bontocani dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Bontocani adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Bontocani dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan :

Tabel 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
a	b	c	d	e (d/c x100%)	f	g	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	100	407.397.950	362.467.590	100	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	99	98	100	370.640.000	275.103.450	98	2

Sumber Data : SPJ Fungsional (C3) Tahun 2022 Kecamatan Bontocani

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bontocani terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan capaian kinerja 100 % dan persentase capaian realisasi anggaran 100 %, menunjukkan bahwa tidak ada efisiensi.
2. Indikator Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dengan capaian kinerja 100 % dan persentase capaian realisasi anggaran 98 %, menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2 %.

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilana/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bontocani sebagai berikut:

Tabel 3.7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	Nilai B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	Perlu adanya Peningkatan Kinerja dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	100	Diperlukan adanya kerja sama antar Tim dalam hal penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	100	100	100	Diperlukan optimalisasi terhadap stakeholder dan pihak terkait dalam hal kordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			PROGRAM PREMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Peningkatan Program Desa ditingkat Kecamatan	100	100	100	Diperlukan optimalisasi terhadap stakeholder dan pihak terkait dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
JUMLAH					100	100	100	

Sumber Data: LPPD Tahun 2022 Kecamatan Bontocani

Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

⇒ **Indikator** : Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP

➤ **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Logoistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

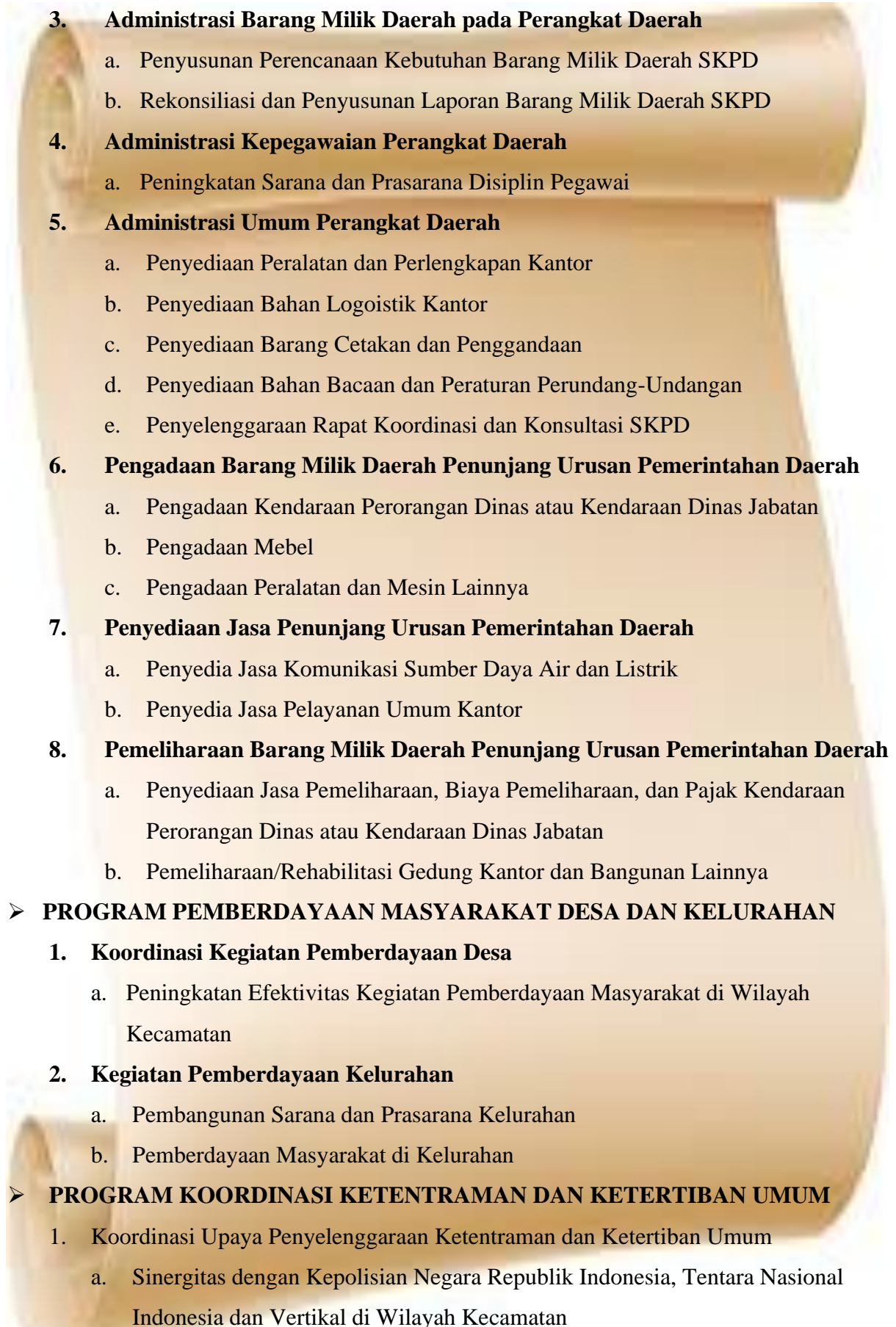
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

⇒ **Indikator** : Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan.

➤ **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- 
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
 - 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logoistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
 - 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
 - a. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
 - 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Vertikal di Wilayah Kecamatan

➤ **PROGRAM PREMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

❖ **UPAYA PERBAIKAN**

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bontocani pada tahun 2022 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapain kinerja tahun berikutnya, yaitu: **"Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan"** & **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"** sebagai berikut:

2. Perlu adanya Peningkatan Kinerja dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
3. Diperlukan adanya kerja sama antar Tim dalam hal penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Diperlukan optimalisasi terhadap stakeholder dan pihak terkait dalam hal kordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan C3 Pagu anggaran belanja Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp. 7.269.094.526 (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1 Realisasi Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		KET.
			ANGGARAN	KINERJA	
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Rp 7.083.414.326	Rp 7.135.477.138	100%	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 154.600.200	Rp 154.600.200	100%	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	100%	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 4.080.000	Rp 4.080.000	100%	
JUMLAH		7.269.094.526	7.321.157.338	100%	-52.062.812

Sumber Data : C3 Des 2022

BAB IV PENUTUP

Sungai Tangka Merupakan Sungai yang melintasi Kecamatan Bontocani dan menjadi perbatasan antara Kecamatan Bontocani dengan Kecamatan Bulupoddo, dan terdapat jembatan gantung yang sangat panjang yang terlerak di Desa Bana dan menjadi penghubung antar warga Bontocani dan warga Sinjai. Serta beberapa sungai yang memiliki destinasi wisata air terjun seperti air terjun di Desa Pattuku, air terjun di Desa Bontojai, dan air Terjun di Kelurahan Kahu.

A. SIMPULAN UMUM

B. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

A. Simpulan Umum

Pencapaian indikator kinerja utama Kecamatan Bontocani dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun anggaran 2022 diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 100 % atau kategori *Tercapai/berhasil*.

B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

Kendala Pelaksanaan

- Terjadinya pandemi Covid – 19 yang mengharuskan perubahan SOP dalam melayani masyarakat.
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (Alat perekaman e-KTP)

Upaya Dalam Mengatasi

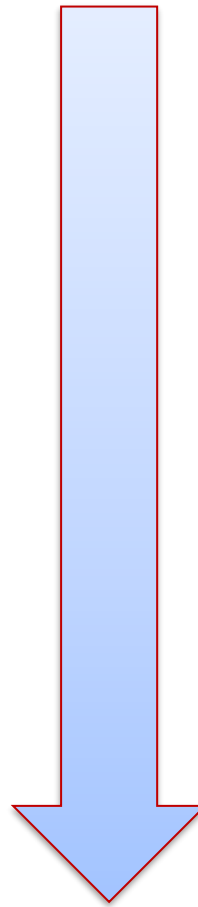
Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

- Melakukan digitalisasi pelayanan (Online)
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
- Melakukan pemeliharaan alat perekaman e-KTP

Lampiran :

- 1). Matriks Renstra
- 2). Cascading Kinerja
- 3). Perjanjian Kinerja
- 4). Ringkasan Pengukuran Kinerja
- 5). IKU
- 6). Penghargaan
- 7). Inovasi
- 8). Lampiran lainnya, dll.

LAMPIRAN



MATRIX RENSTRA secara lengkap dapat diakses dengan memindai QR berikut:

CEK BARCODE



CASCADING KINERJA secara lengkap dapat diakses dengan memindai QR berikut:

CEK BARCODE



PERJANJIAN KINERJA secara lengkap dapat diakses dengan memindai QR berikut:

CEK BARCODE



RINGKASAN PENGUKURAN KINERJA secara lengkap dapat diakses dengan memindai QR berikut:

CEK BARCODE



IKU secara lengkap dapat diakses dengan memindai QR berikut:

CEK BARCODE



PENGHARGAAN secara lengkap dapat diakses dengan memindai QR berikut:

CEK BARCODE



TERIMA KASIH